

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional pada dasarnya diawali dengan interaksi antar negara. Hal tersebut yang mendasari negara dipandang sebagai aktor penting bahkan aktor utama dalam hubungan internasional oleh salah satu teori yakni realisme. Yang mana hal tersebut dikarenakan peran dominan negara dan pengaruhnya di dunia internasional seperti baik itu revolusi industri, perang dunia, hingga perang dingin.

Pasca perang dingin, tatanan masyarakat dunia mulai mengalami perubahan. Mulai timbulnya kesadaran akan hak asasi manusia melandasi pergeseran perhatian internasional dari isu tradisional seperti keamanan negara yakni *struggle for power* menjadi berpusat pada isu non-tradisional seperti keamanan individu (*human security*). Isu ekonomi dan lingkungan juga semakin mendapat perhatian dunia karena baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi ancaman bagi *human security*. Perubahan kondisi tatanan dunia, pergeseran isu internasional hingga perkembangan teknologi menjadi latar belakang kemunculan aktor-aktor lainnya di dunia internasional.

Salah satu bentuk konkret dari pergeseran isu dan juga diakuinya aktor-aktor baru merupakan kerja sama pembangunan global. Pada dasarnya pergeseran isu sudah terjadi sejak sebelum Sustainable Development Goals (SDGs) bahkan United Nations (UN) Global Compact pada tahun 1999 dan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Pergeseran isu pertama kali dicetus oleh UN Development Program (Morrissey, 2019, hal. 1) yakni perlunya perubahan konsep keamanan yang sebelumnya menekankan pada *national security* (keamanan nasional) menjadi lebih ditekankan pada *people's security* (keamanan manusia) lewat pembangunan manusia, keamanan teritorial terhadap pangan, hingga keamanan ketenagakerjaan dan lingkungan.

Global Compact melandasi pergeseran aktor-aktor baru dan disebut sebagai *new chapter* bagi UN karena untuk pertama kalinya UN terbuka untuk mau bekerja sama dengan aktor non-negara yakni sektor bisnis (Pouliot, 2006, hal. 55). Berbagai

kegiatan kerja sama seperti Global Alliance for Vaccines and Immunization yang melibatkan Gates Foundation dan Rockefeller Foundation, hingga World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) pada Johannesburg Summit di 2002 menjadi contoh nyata dilibatkannya aktor baru dalam pembangunan (Pouliot, 2006, hal. 59). Terbukanya UN atau organisasi multilateral terhadap aktor baru dikarenakan oleh semakin dinamisnya tuntutan sosial internasional yang salah satunya yakni perubahan isu sehingga mengharuskan adanya perubahan pendekatan yang digunakan dalam upaya pembangunan (Pouliot, 2006, hal. 56,58).

Perubahan pendekatan tidak hanya sampai pada melibatkan bisnis saja, *Global Compact's multistakeholder approach* merupakan bentuk perluasan keterlibatan aktor baru dimana berusaha mengumpulkan dalam satu meja seluruh aktor yang relevan di bidang pembangunan yang mana aktor tersebut terdiri dari perusahaan privat, serikat kerja, NGO hingga masyarakat sipil (Pouliot, 2006, hal. 56). Pergeseran aktor kemudian berlanjut kerja sama MDGs khususnya tujuan nomor 8 mengenai 'Global Partnership for Sustainable Development' dan dilibatkannya aktor baru selain negara dalam kerangka kerja sama Organisation for economic Co-operation Development (OECD) yakni sektor privat dan organisasi masyarakat sipil (Ziai, 2016, hal. 168).

SDGs menjadi salah satu contoh nyata saat ini mengenai pergeseran baik isu maupun aktor yang meskipun dibentuk dari MDGs sebagai dasar akan tetapi bersifat lebih transformatif dan juga membawa pada perubahan struktural (Fisher & Fukuda-Parr, 2019, hal. 376). Pergeseran isu yang berbeda dari MDGs dapat dilihat bagaimana SDGs tidak hanya fokus pada ekonomi tapi juga terhadap lingkungan sosial dan juga lingkungan (UNSDG, 2020, hal. 5). SDGs memasukan elemen lebih mengenai pembangunan manusia dan juga pendekatan kapabilitas yang berupaya tidak hanya mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi ,tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kemampuan manusia untuk bertindak atas nama mereka lewat pemberdayaan yang tentunya melibatkan berbagai aktor baik itu negara, agensi internasional, NGO hingga sektor privat (Morrissey, 2019, hal. 1,2).

Dengan itu, dilibatkannya beragam aktor merupakan salah satu fokus dalam dalam SDGs yang menyerukan Multi-stakeholder Partnership (MSP) untuk

memobilisasi berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian SDGs (Simon, 2018, hal. 497). Upaya lokalisasi agenda 2030 menjadi ajang perluasan aktor dimana dalam upaya tersebut masyarakat dan institusi lokal yang memiliki peran sentral dipertemukan untuk merespon isu-isu lokal yang mendesak (UNSDG, 2020, hal. 6). Hal tersebut mencerminkan bagaimana SDGs dalam prosesnya tidak terlepas dari baik itu pergeseran isu maupun keberagaman aktor-aktor baru yang terlibat di dalamnya.

Pengangguran merupakan salah satu isu *human security* dalam ekonomi yang hingga saat ini masih merupakan momok bagi negara-negara di dunia. Akan tetapi fenomena *youth unemployment* (pengangguran usia muda) lebih menjadi permasalahan nyata bagi negara-negara di dunia untuk segera diselesaikan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Terdapat tiga hal yang penulis yakini mengenai alasan mengapa fenomena *youth unemployment* ini menjadi urgensi untuk di selesaikan.

Pertama, angka yang terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari ILO (Ayhan, 2016, hal. 263) tingkat persentase *youth unemployment* sejak hingga pasca resesi meningkat yakni dari 2,2 *persen* pada 2008 menjadi 13*persen* pada 2014. Selain itu meskipun sempat turun menjadi 12,9*persen* pada 2015, namun kembali naik pada 2016 dan 2017 yakni sebesar 13,1*persen* (ILO, 2016). Kenaikan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Ahyan (Ayhan, 2016, hal. 264) bahwa masyarakat usia muda merupakan kelompok paling lemah di pasar tenaga kerja sehingga menjadi kelompok yang terdampak paling besar saat krisis melanda. Hal tersebut dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa pada 2020 saat pandemi melanda, tingkat perekrutan anak muda menurun sekitar 8,7*persen* (Forum, 2021) yang tentunya tidak dapat dipungkiri mempengaruhi tingkat *youth unemployment* selanjutnya.

Kedua, hambatan pembangunan. Pemuda pada dasarnya merupakan aset terbesar bagi pembangunan suatu negara. Dapat dilihat dari bagaimana target-target atau program upaya pembangunan melibatkan atau berfokus pada pemuda yang dianggap sebagai pemimpin yang menentukan nasib suatu negara kedepannya. Berdasarkan UN (Prince, Halasa-Rappel, & Khan, 2018, hal. 1) *youth unemployment* menjadi perhatian utama dalam mengatasi permasalahan

kemiskinan yang merupakan tujuan nomor satu dari Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, dengan hubungan ketergantungan antar tujuan SDGs tentunya permasalahan *youth unemployment* menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan lain yang terkait dengan isu tersebut.

Ketiga, menjadi akar dari munculnya permasalahan baru. Tingginya tingkat *youth unemployment* menjadi masalah yang krusial bagi negara dikarenakan menyebabkan tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial. *Youth unemployment* menyebabkan *loss of production* dan juga timbulnya permasalahan kemiskinan (Ayhan, 2016, hal. 265) dalam perekonomian suatu negara. Disisi lain, permasalahan sosial yang dapat timbul berupa kerusuhan sosial, kejahatan, perdagangan ilegal, obat-obat terlarang hingga perdagangan manusia (Ayhan, 2016, hal. 268).

Permasalahan *youth unemployment* seperti yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya tidak hanya perlu diselesaikan di tingkat nasional tapi juga regional dan internasional. Bahkan terdapat dua tujuan yang secara spesifik dirumuskan untuk mengatasi *youth unemployment* dalam SDGs yakni target 4.4 mengenai peningkatan masyarakat dewasa dan pemuda yang memiliki kemampuan yang relevan untuk bekerja Khususnya ICT (Information and Communications Technology) dan 8.6 mengenai pengurangan jumlah masyarakat usia muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah dan tidak dalam pelatihan (Not in Education, Employment or Training).

Di tingkat regional ASEAN, urgensi isu *youth unemployment* juga telah cukup diseriisi. ASEAN telah cukup lama menyadari bahwa pemuda memiliki kerentanan di pasar tenaga kerja seperti (1) kurangnya pengalaman, (2) kurangnya rekening bank, (3) minim keamanan kerja dengan kurangnya peluang peningkatan keterampilan, (4) kurangnya akses ke kredit untuk usaha kewirausahaan, dan (5) rentan terhadap eksploitasi (ASEAN, 2017, hal. 21). Berbagai kebijakan seperti pembuatan *Youth Development Indeks* hingga konferensi ekonomi untuk merumuskan penyelesaian isu pengangguran khususnya *youth unemployment* telah banyak dilakukan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan *youth unemployment*. Di Indonesia permasalahan tersebut bahkan bukanlah sesuatu

yang baru melainkan telah lama ada. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dimana pada 2013 terdapat 708,254 lulusan muda yang menjadi pengangguran (Fattah & Muhamad Imam Syairozi, 2021, hal. 29). Yang mana pada tahun yang sama, tingkat *youth unemployment* di Indonesia melebihi rata-rata regional (Kemnakertrans, 2013, hal. 3).

Memasuki pasca 2015, keadaan *youth unemployment* di Indonesia tidak kunjung membaik. Tingginya tingkat *youth unemployment* di Indonesia pada 2016 dapat dilihat dari Survei Angkatan Kerja Nasional bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah atas dan bahkan pendidikan tinggi (Pratomo, 2017, hal. 643). Hal itu sejalan dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistika) dari tahun 2015-2018 dimana semakin muda angkatan kerja maka tingkat pengangguran semakin tinggi (Gusdwisari, 2020, hal. 217).

Memasuki era digitalisasi, kurangnya lapangan pekerjaan bukan lagi menjadi masalah utama yang melatar belakangi tingginya *youth unemployment* di Indonesia melainkan adanya *gap* atau *missmatch skill* antara *skill* yang diajarkan di perkuliahan dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal tersebut tercermin dari hasil studi Willis Towers Watson pada tahun 2014 mengenai *talent management* dan *rewards* dimana fakta menunjukkan 8 dari 10 perusahaan di Indonesia kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang berkompeten dan siap pakai (Gusdwisari, 2020, hal. 218).

Kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda turut memperparah *youth unemployment* di Indonesia. Pada 2020, tingkat *youth unemployment* Indonesia mencapai 14,76persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia (12,20persen), Singapura (10,6persen), Vietnam (7,63persen), Filipina (7,03persen) dan Thailand (5,16persen) (ILO, 2022). Tidak hanya mempersulit mendapat pekerjaan bagi lulusan muda, pandemi covid-19 juga semakin memperparah tingkat *youth unemployment* dengan tingginya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Berdasarkan data dari Sakernas Agustus 2020, sebanyak 518 ribu pekerja muda mengalami PHK karena covid-19 (Rahman & Fatah, 2021, hal. 2). Hal tersebut tentunya menyumbang terhadap meningkatnya tingkat *youth unemployment* di Indonesia pada saat ini.

Pemerintah Indonesia telah sejak lama berupaya mengatasi permasalahan *youth unemployment*. Perbaikan level pendidikan dengan menetapkan waktu wajib belajar bagi siswa menjadi salah satu yang paling unggul. Semakin berkembangnya zaman yang diikuti dengan turut meningkatnya tuntutan bagi angkatan kerja juga melahirkan program-program seperti pemberian beasiswa tingkat lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Semua program tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengurangi anak muda dalam NEET tapi juga berupaya mengatasi permasalahan *youth unemployment*. Peningkatan level pendidikan hingga pemberian beasiswa nyatanya tidak cukup mampu untuk mengatasi *youth unemployment* yang nyatanya semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman. Peningkatan pendidikan yang hanya dilakukan dengan bentuk kerja sama tradisional tidak lagi efektif untuk permasalahan yang semakin kompleks seperti halnya *youth unemployment*.

Dengan urgensinya tidak hanya untuk mengatasi perekonomian maupun pencapaian SDGs, diperlukan adanya kerja sama dari keseluruhan aktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan *youth unemployment*. Pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) perlu untuk diterapkan guna mempercepat sekaligus menyukseskan upaya pencapaian mengingat tenggat SDGs yang kurang dari 10 tahun lagi dan juga kondisi perekonomian dunia pasca Covid-19 melanda. MSP dibentuk berdasarkan kesadaran akan perlunya aktor lain dalam upaya pencapaian SDGs. Pendekatan MSP merepresentasikan pergeseran dalam pembangunan di mana melihat adanya keterkaitan di antara bisnis, masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan tingkat kerja sama dan kolaborasi yang belum pernah ada antara masyarakat sipil, bisnis, pemerintah, LSM, akademisi dan lainnya (Stibbe & Prescott, 2020, hal. 10).

Implementasi pencapaian SDGs di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs ternyata sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Hal itu membuat RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu dari dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi SDGs di Indonesia. Dalam pelaksanaan implementasi pencapaian SDGs pemerintah turut

mengimplementasikan prinsip yakni *No One Left Behind* yang mana dalam prosesnya melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua mitra (Bappenas, 2020, hal. 23). Perlunya keterlibatan berbagai aktor dalam upaya SDGs juga disampaikan oleh Kepala Bappenas 2018 yakni Bambang Brodjonegoro dimana dengan luas dan komprehensifnya target dan indikator SDGs maka diperlukan adanya kemitraan yang erat baik platform pemerintah, filantropi dan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya (Bappenas, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa MSP sudah diterapkan dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia.

Salah satu bentuk kerja sama MSP dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah program Bridges to The Future (BTF). BTF merupakan program yang ditujukan untuk membentuk komunitas informatif dan suportif terkait karier dan pekerjaan yang memberikan dukungan bagi kaum muda berusia 18-29 tahun dengan berbagai pelatihan baik *soft skill* maupun *hard skill* yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan juga mendapat pekerjaan yang layak. Sejalan dengan waktu pelaksanaan ditengah pandemi Covid-19, program BTF ini tentunya bertujuan untuk mengatasi permasalahan *youth unemployment* yang semakin mengkhawatirkan saat ini. Yang mana akar permasalahannya yakni adanya gap skill dengan tuntutan yang diminta perusahaan dan juga pandemi Covid-19 sehingga aktivitas yang ada dalam program BTF seperti pelatihan hingga *job fair* sangatlah dibutuhkan oleh para pemuda saat ini. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Adegoke, 2015, hal. 21) bahwa dalam mengatasi permasalahan pengangguran usia muda maka diperlukan pelatihan mengenai keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja yang nyata. Sehingga sudah saatnya keterampilan dan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk sesuai dengan kebutuhan kerja (Faqihantara & Manoby, 2020, hal. 162). Program BTF ini juga sejalan dengan apa yang upayakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dimana selain dalam pencapaian SDGs, program ini juga membantu pemerintah dalam mencapai peningkatan produktivitas dan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang menjadi salah satu poin dalam ‘Isu Lingkungan Strategis Pembangunan’ Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang

juga sejalan dengan ‘Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2021’ yang poin pertamanya mengenai peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Program BTF (Bridges to The Future) merupakan bentuk nyata implementasi MSP dalam upaya SDGs mengingat keberagaman aktor yang terlibat didalamnya. Keberagaman aktor yang terlibat mulai dari Organisasi Non Pemerintah (NGO), Organisasi Regional (RO), Filantropi, hingga privat sektor. Dari beragam aktor yang terlibat, penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada dua aktor yang cukup dominan dan merupakan penyelenggara program BTF yakni Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Asean Foundation.

Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Asean Foundation memiliki perhatian yang sama mengenai pentingnya pembangunan pemuda. Plan Internasional Indonesia sejak berdiri pada tahun 1937 telah berkomitmen dalam upaya pembangunan yang mana hal tersebut tercermin dari bagaimana Plan Internasional Indonesia menyebut dirinya sebagai ‘development & humanitarian organisation’ (Plan Internasional). Pengembangan kepemudaan menjadi salah satu fokus dari 7 fokus isu Plan Internasional Indonesiayakni mengenai ‘Skills and Work’. Plan Internasional Indonesia melihat bahwa dalam pembangunan pemuda memiliki dampak yang lebih luas dimana saat pemuda diberdayakan dengan keterampilan maka secara tidak langsung juga akan berdampak lebih luas dalam hal pembangunan dimana bukan hanya melihat pemuda sebagai objek melainkan menjadikan pemuda sebagai agen dari pembangunan yang mana tidak hanya berdampak pada diri individu tapi juga keluarga dan masyarakat. Fokus kepemudaan dalam upaya Plan Internasional Indonesia juga dapat juga dilihat dari salah satunya visinya yakni bekerja untuk memastikan baik itu anak-anak atau bahkan pemuda mengetahui hak mereka, memiliki kemampuan, pengetahuan dan ke percaya dirian untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hal tersebut melandasi pandangan Plan Internasional Indonesia dalam melihat permasalahan *youth unemployment* sebagai urgensi untuk diselesaikan bersama-sama.

Diposisi yang sama, pembangunan pemuda cukup mendapat perhatian dalam organisasi regional ASEAN yang merupakan organisasi yang menaungi Asean Foundation. Youth Development Index (YDI) menjadi bentuk komitmen keseriusan ASEAN dalam hal pembangunan pemuda. Sebagai bagian dari ASEAN

tentunya mengingat perhatian ASEAN yang besar terhadap pembangunan pemuda dan juga isu *youth unemployment* membuat Asean Foundation turut serta dalam upaya pembangunan ASEAN. Hal itu sejalan dengan visi dari Asean Foundation yakni untuk mendukung ASEAN terutama dalam mempromosikan kesadaran, identitas, interaksi dan pengembangan masyarakat ASEAN. Berdasarkan kesamaan pandangan mengenai urgensi itulah Yayasan Plan Internasional Indonesia Indonesia dan Asean Foundation mengadakan kolaborasi yang melahirkan program *The Bridges to The Future*.

Implementasi kerja sama MSP telah banyak dilakukan dalam upaya pencapaian SDGs di dunia. Keunikan bentuk kerja sama yang menghadirkan berbagai aktor dan juga kompleksnya proses kerja sama menarik banyak penelitian dilakukan dalam melihat lebih jauh mengenai hal tersebut. Terdapat pula perdebatan dalam menilai kerja sama MSP di dunia. Seperti yang terdapat dalam karya tulis Reinsberg & Westerwinter (2019, hal. 14,15) dimana memperlihatkan terdapat peningkatan kerja sama MSP khususnya pada level TGI (*Transnational Public-private Governance Initiative*). Akibat dari peningkatan tersebut melahirkan perdebatan atas dasar kekhawatiran akan hilangnya peran negara di politik global dan digantikan dengan aktor swasta (Reinsberg & Westerwinter, 2019, hal. 29). Peran negara dikatakan hilang sebagai implikasi dari bergabungnya dan mulai dominannya aktor-aktor lain non negara. Dalam karya tulis ini, Reinsberg & Westerwinter berupaya untuk meluruskan bahwa meskipun MSP dalam hal ini TGI melibatkan berbagai aktor dalam politik global, peran negara tidak semata-mata hilang dan masih menjadi aktor yang penting baik dalam upaya pembangunan maupun dalam politik global secara umum.

Disisi lain penelitian yang dilakukan mengenai MSP juga difokuskan pada penilaian baik itu efektifitas, legitimasi dan juga akuntabilitas. Kerja sama MSP tentunya terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Backstrand (2006, hal. 290-306) berfokus pada bentuk kerja sama MSP awal yakni *Johannesburg Partnerships*. Dimana penelitian bertujuan untuk melihat tingkat legitimasi dari bentuk kerja sama MSP tersebut. Yang mana Backstrand mengemukakan bahwa dalam menilai legitimasi suatu kerja sama MSP dapat dilihat dari input dan output yang mencakup efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kapabilitas *problem solving*. Selain itu

juga, Backstrand juga menekankan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan penelitian menyimpulkan bahwa kemitraan membawa keuntungan seperti hubungan yang lebih jelas dengan institusi dan perjanjian multilateral, target dan jadwal yang terukur, mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, tinjauan, pelaporan dan pemantauan yang lebih sistematis. Masih dalam aspek penilaian dalam MSP, Sanderlink & Nasiritousi (2020, hal. 1-11) berfokus pada bagaimana melihat efektivitas MSP dari sisi interaksi antar aktor yang terlibat. Dengan berfokus pada kerja sama untuk upaya energi terbarukan, Sanderlink dan Nasiritousi mengemukakan konsep interaksi institusi yang dibagi menjadi 5 jenis yakni *Political Interaction*, *Cognitive Interaction*, *Normative Interaction*, *Behavioral* dan *Impact Level*. Meskipun tidak secara jelas menggambarkan bagaimana pengaruh interaksi terhadap efektivitas kerja sama, karya tulis ini memberikan konsep-konsep yang bisa menjadi referensi penulis untuk diaplikasikan dipenelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya, penelitian mengenai MSP juga dilakukan dengan berfokus pada sisi keterlibatan aktor. Clark & MacDonald (2019, hal. 1-19) menggunakan Resource-Based View (RBV) dalam melihat sisi keuntungan dari keterlibatan aktor atau mitra dalam kerja sama. Dimana sifat MSP yang inklusif memungkinkan mitra atau aktor yang terlibat untuk mendapatkan akses yang lebih terhadap sumber daya yang ada. Dengan menggunakan RBV, keuntungan atau *outcome* diklasifikasikan menjadi 4 yakni *physical* dan *finansial capital*, *human capital*, dan *organisational capital*. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa kemitraan tidak hanya membawa keuntungan dari capaian tujuan program di level kerja sama tapi juga keuntungan bagi aktor atau mitra yang terlibat didalamnya.

Selain itu, masih menekankan ada sisi keterlibatan aktor, Wehrmann (2018, hal. 1-50) dengan menggunakan kerangka kerja sama GPEDC (The Global Partnership for Effective Development Co-operation) mengemukakan mengenai pentingnya perbaikan di insentif dan juga regulasi kerja sama. Dimana Wehrman merekomendasikan poin yang bisa diaplikasikan dalam kerja sama MSP yakni memperkuat pengawasan dan tata kelola kelembagaan, pembentukan strategi inisiatif dan juga regulasi perlu didasarkan pada kasus spesifik, dan lebih menitikberatkan pada kerja sama dengan konteks yang spesifik untuk bisa menarik

sektor swasta untuk dapat bergabung. Sedangkan (Okitasari, Prabowo, & Santono, 2020, hal. 61-86) memfokuskan penelitian untuk mengemukakan instrumen-instrumen yang bisa diaplikasikan untuk mendukung pelaksanaan MSP dalam pencapaian SDGs. Penelitian memiliki perbedaan dikarenakan fokusnya yakni MSP di level lokal dengan melihat keterlibatan aktor di dalam setiap fase kerja sama. Dalam penelitian ini Mehesti et al. secara khusus mengemukakan bahwa peran pemerintah seperti regulasi, kebijakan, kepemimpinan politik, peningkatan kapasitas, kesadaran pemerintah merupakan hal yang penting dalam mendukung proses kerja sama MSP di Indonesia.

Tidak hanya pada isu-isu sebelumnya, terdapat penelitian lainnya yang berfokus pada urgensi dan pentingnya implementasi MSP dalam pencapaian SDGs. Buyuktanir (2016, hal. 1-11) mengemukakan bahwa kerja sama MSP merupakan kebutuhan mengingat isu dan juga permasalahan yang semakin dinamis sehingga tidak lagi memungkinkan bagi aktor tunggal bekerja sendirian. Dengan berfokus pada krisis pengungsi Suriah sebagai studi kasus, Buyuktanir menjelaskan bahwa keterlibatan aktor lain penting dalam membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut. Dalam hal ini sektor privat dinilai menjadi pemain yang cukup penting dan dibutuhkan dalam permasalahan krisis kemanusiaan dimana sektor privat dianggap mampu dan dapat secara signifikan menangani kebutuhan kemanusiaan mengingat resources dan kemampuan invasi yang dimiliki. Selanjutnya, Haywood et al. (2019, hal. 1-13) juga berfokus pada urgensi kerja sama MSP dalam upaya pencapaian SDGs. Penelitian ini melihat hubungan antar aktor baik dari sisi tanggung jawab dan juga upaya dalam pencapaian SDGs di Afrika. Hal ini sejalan dengan saran The Partnering Initiative (Prescott & Stibbe, 2016, hal. 6) yang menyarankan bahwa platform Multi-Stakeholder adalah mekanisme penting untuk meningkatkan kemitraan.

Selain penelitian secara umum mengenai MSP, terdapat pula penelitian yang menggambarkan secara khusus peran berbeda setiap aktor didalam proses kerja sama tertentu. Bagaskara & Pattipelo (2018, hal. 1-9) menggambarkan salah satu implementasi MSP di Indonesia yakni kerja sama Pemerintah dalam hal ini Polri dengan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes). Dalam penelitian ini dikemukakan mengenai peran

ECPAT sebagai *civil society organisation* dalam proses kerja sama. Yang mana dari ECPAT menjalankan 3 dari 4 peran CSO yakni *agenda setter, educator dan counterparts*. Meskipun berfokus pada peran NGO dalam kerja sama MSP, penelitian ini juga menekankan bahwa komunikasi dan keselarasan koordinasi antar mitra yang terlibat merupakan hal yang penting mengingat kegagalan program ini dikarenakan kurangnya dua hal tersebut.

Walker (2016, hal. 55-61) membawa perspektif baru dalam menggambarkan peran dan juga bentuk hubungan kerja sama aktor dalam MSP. Dimana dalam penelitiannya menggunakan program *Capacity building* yakni 'Partnership for Advocacy in Child and Family Health Project (PACFaH)'. Dimana hubungan dan peran yang dideskripsikan dalam penelitian ini merupakan The Gates Foundation yang bekerja sama dengan NGO di Afrika. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama MSP tidak hanya difokuskan untuk keuntungan sosial saja tapi juga untuk keuntungan di level mitra. Selain itu juga secara tidak langsung memberikan kesadaran bahwa selain hal-hal eksternal pokok yang menjadi penentu sukses atau tidaknya upaya MSP dalam pencapaian SDGs, kualitas dan kapabilitas aktor juga menjadi hal yang penting dalam menyukseskan upaya tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai kerja sama MSP telah banyak dilakukan mulai dari sisi perdebatan (Reinsberg & Westerwinter, 2019), efektivitas dan legitimasi (Bäckstrand, 2006) (Sanderink & Nasiritousi, 2020), keterlibatan aktor (MacDonald, Clarke, Huang, & Seitanidi, 2019) (Wehrmann, 2018) (Okitasari, Prabowo, & Santono, 2020), urgensi dan implementasi (Buyuktanir, 2016) (Haywood, Funke, Audouin, Musvoto, & Nahman, 2019), hingga peran aktor secara spesifik (Bagaskara & Pattipelo, 2018) (Walker, 2016). Isu *youth unemployment* meskipun telah lama ada, akan tetapi baru mendapat perhatian dalam upaya pembangunan. Pandemi Covid-19 dan juga tuntutan perkembangan teknologi semakin menonjolkan urgensi akan isu tersebut. Oleh karena itu, riwayat studi mengenai kerja sama MSP program pembangunan terkhusus dalam upaya mengatasi *youth unemployment* masih sedikit dilakukan. Kemudian, literatur review sebelumnya juga menunjukkan bahwa mayoritas studi MSP sebelumnya berfokus pada level program baik itu, sumber daya, efektivitas, maupun *impact* dari program

pembangunan. Padahal, aktor atau mitra yang terlibat juga menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana suatu program berjalan. Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik untuk penelitian ini berfokus pada keterlibatan aktor spesifik dalam proses penyelenggaraan program Bridges to The Future terkhusus pada interaksi antar mitra dalam upaya untuk mengatasi permasalahan *youth unemployment* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pergeseran dan juga semakin dinamisnya isu-isu didunia pembangunan menjadikan kerja sama MSP sebagai kebutuhan, bukan lagi sebuah pilihan. Isu yang semakin beragam dan saling terkaitnya satu sama lain mengharuskan keterlibatan aktor-aktor dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama. Lahirnya MSP yang melibatkan aktor-aktor baru dan juga berbeda ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Bridges to The Future merupakan bentuk program yang jika dilihat dari produk-produknya seperti pelatihan, diskusi, pengenalan hingga pendampingan merupakan upaya yang sesuai untuk mengatasi permasalahan *youth unemployment*. Dengan beragamnya produk-produk tersebut, interaksi antar aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan juga penting untuk menentukan kualitas program BTF. Selain itu, penulis mengambil periode 2021 hingga 2022 sebagai fokus waktu dikarenakan periode tersebut merupakan waktu berlangsungnya kerja sama BTF yang menjadi fokus penelitian. Dengan urgensi penyelesaian masalah dan luasnya aktor yang terlibat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang diangkat, yakni:

“Bagaimana kerja sama Plan Internasional Indonesia dan Asean Foundation dalam skema Multi Stakeholder Partnership di penyelenggaraan Bridges to The Future periode 2021-2022?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan mendeskripsikan peran dan pola kerja sama aktor dengan menerapkan institutional interaction dalam menjelaskan proses interaksi kerja sama

Multi-Stakeholder Partnership selama pengimplementasi program Bridges to The Future.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam ilmu hubungan internasional yakni berkontribusi dalam memperjelas dan membedah konsep Multi Stakeholder Partnership yang dilihat dari perspektif keterlibatan NGO dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai penggunaan kerangka institutional interaction dalam menggambarkan interaksi kerja sama aktor dalam studi kasus Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pertimbangan lebih lanjut bagi pemangku kebijakan ataupun aktor lain dalam mendukung pencapaian SDGs mengenai *decent work and economic growth* untuk memperbarui atau mengevaluasi program-program pembangunan khususnya mengenai pembangunan sumber daya manusia atau permasalahan pengangguran sesuai dengan tuntutan di lapangan yang terus bertambah dan berkembang setiap waktu. Yang mana salah satunya seperti program pelatihan yang disertai dengan sertifikasi sehingga tidak hanya dapat menambah *skill* dan kualitas SDM tapi juga sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan peluang bagi angkatan kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian yang dimulai dari pemaparan latar belakang beserta penelitian-penelitian terkait topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam karya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya, dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah penelitian. Selain itu penulis mengemukakan kerangka penelitian yang berisi mengenai gambaran umum alur berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian mulai dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu mengenai kerangka rencana waktu penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM *YOUTH UNEMPLOYMENT* DI INDONESIA DAN PROJEK BTF

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan data-data dan juga informasi yang didapat untuk menjelaskan dinamika permasalahan *youth unemployment* di Indonesia seperti latar belakang dan tren pengangguran usia muda di Indonesia, dan pendapat ahli mengenai fenomena tersebut. Yang mana data dan informasi tersebut akan di uraikan untuk memperlihatkan bagaimana pengangguran usia muda di Indonesia merupakan urgensi dalam capaian pembangunan khususnya pembangunan SDM dan juga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penulis akan mendeskripsikan secara umum mengenai proyek kerja sama MSP ‘The Bridges to The Future ‘. Yang mana deskripsi umum itu meliputi aktivitas yang ditawarkan dalam program, fasilitas, target atau sasaran program, peserta dan juga lanskap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

BAB V KERJA SAMA MSP DALAM PROJEK BTF: TINJAUAN ANALISIS TERHADAP INSTITUTIONAL INTERACTION PLAN INTERNASIONAL INDONESIA – ASEAN FOUNDATION

Bab ini akan berisi penjelasan dan deskripsi secara khusus mengenai interaksi kerja sama yang difokuskan pada dua aktor yakni Plan Internasional Indonesia dan Asean Foundation dalam kerja sama Multi-Stakeholder Partnership untuk

menyelenggarakan proyek ‘The Bridges to The Future’ beserta hasil *output* dari proyek tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian dan saran yakni masukan terkait upaya penyelesaian permasalahan maupun pencapaian SDGs terkhusus untuk topik *Youth unemployment* di Indonesia.